



PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI TRANSNATIONAL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: STUDI KASUS BANK SAMPAH BINTANG SEJAHTERA LOMBOK

Maria Qibtiya, Yuherina Gusman

Prodi atau Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

Abstrak

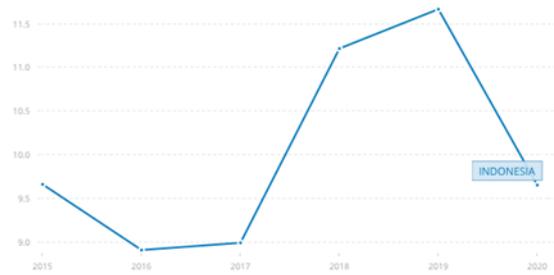
Transnational Public Private Partnership (TPP) telah menjadi pembahasan yang hangat dibicarakan akademisi Hubungan Internasional semenjak beberapa dekade terakhir. Bentuk kemitraan ini memberikan ruang bagi negara untuk bekerjasama dengan aktor non-negara termasuk pihak swasta dan masyarakat sipil dalam menjawab tantangan global. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah tentang kemitraan Australia dengan Bank Sampah Bintang Sejahtera di Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan lingkungan dengan memberdayakan pekerja migran, mantan pekerja migran, dan keluarganya. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan observasi langsung ke lokasi. Dan data sekunder melalui library research dan pengumpulan data lainnya melalui media massa dan media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa TPP dapat menjadi alternatif bagi negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya seperti Australia dalam mewujudkan foreign policy whiter paper 2017 yang ingin berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang terangkum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya ini sebagai strategi membangun pengaruh Australia di Kawasan Asia Pasifik. Di sisi lain, TPP juga dapat membantu masyarakat sipil dan pemerintahan lokal untuk menghadirkan solusi dari beberapa permasalahan yang ada, dalam hal ini di NTB, melalui Bank Sampah Bintang Sejahtera kemitraan yang terjalin dapat membantu pemerintah lokal mengatasi permasalahan kemiskinan dan lingkungan.

Kata Kunci: Transnational Public Private Partnership, Australia, SDGs, bank sampah, pekerja migran.

PENDAHULUAN

Migrasi Tenaga Kerja merupakan fenomena global yang tidak dapat dielakkan keberadaannya. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran di dalam negeri selain juga karena tingginya permintaan dari luar negeri untuk beberapa jenis lapangan pekerjaan seperti perawat lansia, pekerja domestik, pekerja perkebunan, *home industry*, dan konstruksi. Permintaan ini banyak berasal dari negara yang cenderung memiliki peningkatan populasi penduduk tua dan rendahnya angka kelahiran sehingga diperlukan pekerja dari luar untuk mempertahankan produktivitas negara tersebut (Iqbal & Gusman, 2015). Selain itu PMI juga memberikan manfaat yang besar seperti, mempererat hubungan antar negara (antara Indonesia dengan negara penerima pekerja migran), mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi untuk mendongkrak transfer teknologi, serta meningkatkan pembayaran pada neraca pembayaran negara (devisa) melalui remitansi (Erizal dkk., 2020).

Remitansi atau pengiriman (transfer) uang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya cukup besar. World Bank mencatat jumlah remitansi Indonesia berturut-turut sejak 2015-2020 sebesar: 9.66 Juta Rupiah, 8.91 Juta Rupiah, 8.99 Juta Rupiah, 11.22 Juta Rupiah, 11.67 Juta Rupiah, 9.65 Juta Rupiah.



Gambar 1. Jumlah Remitansi Indonesia 2015-2020

Sumber: <https://data.worldbank.org>

Jumlah remitansi tersebut setara dengan 1-1.1% GDP Indonesia (WorldBank, 2022). Remitansi tersebut merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, remitansi para PMI merupakan penyumbang terbesar kedua setelah minyak dan gas. Setiap tahunnya sumbangan devisa dari remitansi PMI hampir mencapai 160 triliun yaitu sebesar Rp. 159,6 triliun per tahun (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022).

Secara umum Pekerja Migran banyak berasal dari Asia dan Pasifik dengan wilayah tujuan utama kawasan Asia (35%), Timur Tengah (27%), Eropa (19%) dan Amerika Utara (18%) (Aswindo dkk., 2021). Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak menempatkan pekerja migran di berbagai negara, sekitar 7% dari pekerja migran dunia berasal dari Indonesia atau setara dengan 9 juta orang dengan 10 negara tujuan favorit yaitu: Hongkong, Taiwan, Italia, Singapura, Polandia, Turki, Arab Saudi, Malaysia, Maldives dan United Emirate Arab (UEA) (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022).

Setiap tahunnya, Indonesia menempatkan ratusan ribu pekerja migran. Di tahun 2019 tercatat jumlah penempatan PMI ke sejumlah negara mencapai 277.489 orang, pada tahun 2020 mencapai 113.436 orang, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 72.624 orang. Lombok merupakan salah satu kabupaten pengirim PMI terbanyak

di Indonesia. Alasan yang menjadi faktor pendorong bagi warga Lombok untuk bermigrasi adalah kondisi yang kurang menguntungkan di daerah asal.

Sebanyak 27.432 PMI berasal dari Lombok dalam rentang waktu 2019-2021 (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022). Tidak sedikit ditemukan kasus mengenai PMI unprosedural atau PMI ilegal di Lombok, khususnya sejak masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa negara menutup penempatan PMI seperti Malaysia. Adanya PMI unprosedural juga didorong karena SDM yang tidak memiliki kompetensi akibat tingkat pendidikan yang rendah dan adanya perbedaan peraturan mengenai konversi visa di beberapa negara sehingga kebijakan ini dimanfaatkan oleh para calo atau tekong.

Walau menjadi PMI memiliki manfaat ekonomi yang cukup menjanjikan, namun migrasi tenaga kerja memiliki dampak sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh semua *stakeholders* yang terlibat dalam proses migrasi ini. Permasalahan tersebut diantaranya masalah ketika PMI kembali ke tanah air, banyak dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya menganggur selama kembali ke tanah air. Sehingga menyebabkan sulitnya memutus mata rantai pengiriman PMI ke luar negeri. Masalah lain yaitu faktor keluarga yang kurang harmonis terutama pada anak-anak akibat ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri sehingga muncul masalah terhadap perkembangan anak yang ditinggalkan. Menurut hasil penelitian mengenai perkembangan psikologis anak pekerja migran, 40% anak PMI memiliki perkembangan psikologis yang kurang baik, sedangkan anak usia remaja cenderung melakukan penyimpangan sosial (Nurhidayati, 2014).

Melihat kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh

pengiriman pekerja migran ini, maka penyelesaiannya tidak bisa hanya dibebankan kepada negara dan keluarga inti saja. Perlu adanya dukungan dari banyak pihak seperti masyarakat di negara pengirim dan penerima, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga Pendidikan, dan pihak lain yang merasakan dampak langsung ataupun tidak langsung dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Wong (2007) mengidentifikasi tiga jenis dukungan yang dapat diberikan kepada PMI yakni: dukungan emosional, yang mengacu pada perasaan dicintai dan keamanan; dukungan instrumental, yang mengacu pada bantuan langsung seperti finansial; dan dukungan informasi, yang terdiri dari pemberian nasihat atau bimbingan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan sektor swasta (Wong dkk., 2007).

Masyarakat Sipil dan sektor swasta memiliki andil penting untuk mencapai tujuan pembangunan, dan keterlibatan mereka dapat membantu meningkatkan hubungan antara migrasi dan pembangunan berkelanjutan (International Organization for Migration, 2022). Sejauh ini kecenderungan sektor publik untuk terlibat dengan swasta masih terbatas. Salah satunya yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap pekerja migran dan keluarganya di Lombok melalui perantara Bank Sampah Bintang Sejahtera.

Landasan Teori

Sektor swasta merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Kehadiran pihak swasta membuka pintu kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang mana mayoritas isu-isu pembangunan dilakukan oleh sektor publik. Akan tetapi, kecenderungan sektor publik untuk

berkolaborasi dengan sektor swasta masih terbatas. Oleh karena itu pelaku dari sektor publik harus menerapkan serangkaian cara dan metode yang komprehensif untuk menginisiasi dan menjaga kerjasama sektor publik dan swasta.

Secara umum, kerjasama antara sektor swasta dan publik dikenal dengan *Public Private Partnership* atau Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS). KPS merupakan salah satu teori yang berlandaskan pada bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam menyediakan barang publik atau *public good* seperti infrastruktur, fasilitas sosial dan pelayanan umum dalam prioritas yang besar. Kerjasama dalam bentuk KPS diharapkan dapat menyediakan barang ataupun layanan publik yang dapat menciptakan kualitas hidup masyarakat yang jauh lebih baik.

Penerapan teori ini populer sejak awal tahun 1990-an di Inggris dan diikuti negara maju lainnya seperti Australia dan Jepang. Seiring berjalannya waktu semakin banyak negara yang mengadopsi teori ini karena dianggap sebagai wujud inovasi dalam berinvestasi guna memberikan layanan publik yang baik (Nurhayati dkk., 2021). KPS memiliki karakteristik utama yaitu melibatkan swasta dengan fokus pada *output* yang dihasilkan, optimalisasi alokasi risiko pemerintah dan swasta, peningkatan efisiensi dan akses teknologi yang lebih maju serta bersifat kontrak jangka panjang. Banyak pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan KPS dengan melibatkan swasta untuk menyediakan barang dan layanan publik khususnya infrastruktur karena keterbatasan anggaran (Liu dkk., 2015). Melalui KPS, pemerintah juga memungkinkan dapat keuntungan dari swasta dalam mengalihkan risiko kepada pihak swasta sehingga pemerintah dapat fokus pada pembuatan kebijakan, perencanaan dan regulasi (Soemitro & Suprayitno, 2020).

Namun seiring perkembangan zaman disertai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola KPS mengalami perubahan model dan cara implementasi. Globalisasi yang mengaburkan batas antar negara dan semakin tingginya aktivitas transnasional menghadirkan pola baru kemitraan sektor publik dan swasta yang dikenal dengan *Transnational Public-Private Partnership* (TPP). Menurut Sun yang dikutip oleh Andonova (2017), TPP diartikan sebagai "*an agreement for collaborative governance between public and non-state actors that establish common norms, rules, objective, and decision-making and implementation procedures for a set of policy, problems, and transnational refers to the participation of actors from different countries*" (p.25-26). Dengan kata lain, TPP merupakan bentuk pemerintahan *hybrid* karena melibatkan *non-state actor* (Andonova, 2017).

Schoferhott (2009) menekankan bahwa TPP merupakan sebuah komitmen untuk berbagi risiko dan tanggung jawab antara negara dengan aktor non-negara seperti organisasi internasional (OI), Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta lainnya. Aktor-aktor ini sepakat untuk berbagi risiko, kewajiban, sumberdaya, kompetensi, dan keuntungan. Perbedaan paling mendasar antara KSP dengan TPP yaitu keterlibatan pihak publik dan swasta terjadi dengan melewati lintas negara. RisseKappen (1995) menjelaskan bahwa TPP merupakan pertukaran lintas negara (*cross-national exchange*) yang memungkinkan entitas di satu negara untuk campur tangan di wilayah negara lain (RisseKappen, 1995).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan melakukan

in-depth interview kepada pihak-pihak yang terlibat baik dari Bank Sampah Bintang Sejahtera maupun penerima Australian Alumni Grant Scheme (AAGS). Adapun data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan mencari data pendukung berupa buku, jurnal, dan publikasi di media massa.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pelaksanaan penelitian dengan mengamati suatu program, aktivitas, peristiwa, proses atau kelompok individu dengan cermat (Creswell, 2012). Adapun yang diteliti adalah salah satu Bank Sampah di Lombok bernama Bank Sampah Bintang Sejahtera yang memberdayakan PMI di Lombok melalui kerjasama dengan berbagai partner baik pihak publik maupun swasta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Australia Alumni Grant Scheme (AAGS)

Pada awal 1950-an, Australia memulai upaya diplomasi publiknya dengan melibatkan Asia melalui *New Colombo Plan* (NCP). Dengan adanya Colombo Plan membuka peluang bagi pelajar di Asia untuk datang ke Australia dan memperoleh keterampilan serta pengetahuan yang berguna. Selain meraih pelajar Asia untuk datang ke Australia, NCP juga berfokus ke luar, dengan memfasilitasi pelajar Australia yang tertarik untuk belajar di kawasan Indo-Pasifik. Pada tahun 2013, upaya ini secara resmi dijadikan strategi diplomasi publik Australia. Pendidikan internasional bukanlah strategi jangka pendek, karena untuk melihat hasilnya membutuhkan waktu beberapa decade (McConachie, 2019).

Kini, tidak kurang sebanyak 2,5 juta mahasiswa internasional telah belajar di Australia dalam lima puluh tahun terakhir. Mahasiswa internasional ini dan orang Australia yang belajar di luar negeri melalui NCP membentuk

Komunitas Alumni Global Australia. Komunitas ini dibentuk sebagai bentuk diplomasi publik Australia melalui sektor Pendidikan dan berupaya membuka potensi penuh komunitas Alumni Global Australia yang juga berfungsi untuk membina anggotanya agar secara aktif terlibat dan mempromosikan Australia (The Global Alumni Team, 2022). Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka disusunlah *Australia Global Alumni Engagement Strategy 2016–2020* dengan empat prioritas utama: 1) memperkuat diplomatik akses dan pengaruh; 2) meningkatkan perdagangan, investasi, dan jaringan bisnis; 3) mempromosikan kapasitas dan kredensial dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi; 4) memperlihatkan kepada dunia sosok Australia yang inovatif dan terbuka.

Alumni merupakan aset luar biasa, karena banyak alumni yang memiliki posisi berpengaruh di negara asalnya yang dapat membantu Australia memahami isu-isu kunci di wilayah mereka. Para alumni juga menjadi pembuka pintu bagi hubungan diplomatik dan bisnis serta kerjasama lainnya yang diwujudkan melalui program Australia Global Alumni Award. Pada bulan April 2016, pemerintah Australia membentuk Australia Global Alumni Awards sebagai upaya untuk menciptakan jaringan global bagi orang-orang yang pernah belajar di Australia, termasuk dari Indonesia. Jaringan ini dibentuk untuk memfasilitasi alumni untuk tetap terkoneksi dengan sesama alumni, almamater, universitas, bahkan sektor publik dan swasta di Australia. Bentuk nyata dari upaya menciptakan jaringan global tersebut adalah dengan melahirkan *Australia Alumni Grant Scheme* (AAGS).

AAGS menawarkan pendanaan awal untuk program-program yang menciptakan dampak di bidang profesional, organisasi, dan komunitas dengan tujuan: a) memberikan

kesempatan kepada alumni untuk meningkatkan dan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk diterapkan secara langsung; b) mengembangkan, memelihara, dan memperkuat hubungan dan kemitraan profesional antara alumni dan pemerintah Australia, serta sektor bisnis, organisasi, dan lembaga pendidikan Australia; c) menghubungkan alumni satu sama lain yang lintas disiplin dan profesi, bahkan lintas wilayah geografis untuk menciptakan peluang kolaborasi; d) menunjukkan keunggulan Australia sebagai penyedia pendidikan global dan penelitian berkualitas tinggi (AGS Indonesia, 2022).

Survey yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia terhadap program Global Alumni award pada tahun 2020 yang lalu menemukan bahwa melalui program ini para alumni dengan keahlian, pengetahuan, dan jaringan yang mereka miliki ditambah dukungan dari pemerintah Australia berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Alumni dapat berkontribusi untuk terciptanya hubungan yang lebih baik antara Australia dan negara asal alumni (Edwards & Radloff, 2021). Melalui program ini juga komunikasi pertama antara Bank Sampah Bintang Sejahtera dengan Pemerintah Australia terbentuk.

Bank Sampah Bintang Sejahtera

Bank sampah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 pasal 1 merupakan tempat pengumpulan dan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau digunakan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi. Seperti pada definisinya, bank sampah memiliki fungsi sebagai fasilitator pengumpulan sampah, penyedia data pengepul atau pembeli sampah serta menyediakan data industri daur ulang. (Halid dkk., 2022). Pada studi kasus ini, Bank sampah yang

menjadi objek penelitian adalah Bank Sampah Bintang Sejahtera yang dirintis sejak tahun 2009 dan resmi menjadi sebuah UD (Usaha Dagang) pada tahun 2010 yang kemudian menjadi Bank Sampah sejak diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012.

Bank sampah Bintang Sejahtera bergerak seperti bank sampah pada umumnya yang juga memiliki fungsi tambahan tersendiri. Tidak hanya peduli mengenai timbunan sampah di Nusa Tenggara Barat, Bank sampah Bintang Sejahtera juga memiliki kepedulian terhadap PMI yang berada di NTB khususnya Kabupaten Lombok. Data BP2MI menyebutkan bahwa Kabupaten Lombok khususnya Lombok Timur dan Tengah memiliki jumlah PMI terbanyak di Provinsi NTB (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022). Sekitar 7-8 dari 10 orang yang ditemui Bank sampah Bintang Sejahtera merupakan seorang PMI, mantan PMI dan keluarga PMI. Banyak dari masyarakat Kabupaten Lombok lebih memilih merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah yang layak.

Mayoritas masyarakat NTB merantau ke luar negeri dengan niat memiliki tingkat hidup yang lebih baik. Akan tetapi tidak semua berjalan seperti apa yang diinginkan, banyak dari PMI Kabupaten Lombok yang pada akhirnya tidak bisa kembali ke NTB karena berbagai hal baik kendala ekonomi di negara penempatan PMI bekerja maupun kehilangan nyawa. Kementerian Ketenagakerjaan RI menyebutkan 841 PMI meninggal dunia dalam kurun waktu 2020-2021 (Migrant Care, 2020).

Besarnya jumlah PMI serta kekhawatiran akan keselamatan PMI tersebut menjadikan Bank sampah Bintang Sejahtera memulai program bank sampah yang turut memberdayakan PMI di Kabupaten Lombok. Selain itu, dampak negatif migrasi internasional yang cukup besar menimpa anak-anak PMI seperti

tingginya angka putus sekolah, anak-anak menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, serta dampak psikologis yang mengakibatkan banyak diantara mereka terlibat penyimpangan sosial menjadi alasan kuat Bank Sampah Bintang Sejahtera untuk memberdayakan PMI dan keluarganya. Harapannya PMI dapat berdaya di kampung sendiri tanpa harus keluar negeri.

Bank sampah Bintang Sejahtera memiliki cabang atau unit bank sampah yang tersebar di berbagai kabupaten NTB sebanyak 400 unit bank sampah. Cabang dan unit tersebut turut memberdayakan masyarakat sekitar termasuk PMI, mantan PMI dan keluarga PMI. Bapak Syawaludin, S.E. selaku pemilik dan pendiri Bank sampah Bintang Sejahtera menjadikan kegiatan bank sampah ini sebuah lapangan pekerjaan yang mendatangkan peluang ekonomi dan bisa menjadi alternatif bagi para PMI yang tidak bisa atau tidak ingin kembali bekerja ke luar negeri dan tidak ingin jauh dengan keluarganya.

Seiring berjalannya waktu, Bank Sampah Bintang Sejahtera mendapatkan banyak dukungan dan mitra baik dari dalam negeri seperti Pemerintah Provinsi, kementerian dan mitra swasta ataupun mitra luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, India, Denmark, dan New Zealand. Bentuk kerjasama antara Bank Sampah Bintang Sejahtera dengan mitra dalam dan luar negeri dilakukan melalui program kerjasama, hibah dan peningkatan kapasitas SDM (Bintang Sejahtera, 2022).

Salah satu program yang diadakan oleh Bank Sampah Bintang Sejahtera bersama pemerintah Australia adalah pelatihan dan seminar untuk anak-anak pekerja migran yang ada di bawah binaan Bank Sampah Bintang Sejahtera. Kegiatan yang berjudul "Education Seminar and Training for Children of Migrant Workers Family in Lombok Timur, NTB" berlangsung pada bulan Juli hingga Oktober 2017. Kegiatan

ini dilaksanakan untuk memberdayakan anak-anak keluarga pekerja migran melalui dukungan sosial dan psikologis, pelatihan keterampilan hidup dan bantuan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan melalui program *Alumni Grand Scheme* (AGS) 2017 ini mendapatkan respon baik dari pemerintah Australia sehingga dilanjutkan pada program AGS berikutnya dengan format yang berbeda.

Program "Sampahku Sumberdaya ku" menjadi program lanjutan dengan mitra luar negeri yaitu Australia. Bank sampah Bintang Sejahtera mengikuti program *Alumni Grand Scheme* (AGS) 2020 putaran kedua. Bank sampah bintang sejahtera mengajukan proposal dalam program AGS dengan menawarkan *outcome* atau hasil mengenai pelaksanaan fungsi edukasi lingkungan kepada masyarakat, kontribusi masyarakat terhadap pengurangan sampah yang terbuang ke lingkungan, dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang telah diolah. Hal ini sejalan dengan fungsi utama Bank sampah Bintang Sejahtera, yaitu: 1) Melakukan edukasi kepada masyarakat; 2) Merubah perilaku masyarakat; 3) Fungsi sirkular ekonomi (Syawaludin, komunikasi pribadi, 22 Maret 2022).

Program "Sampahku Sumberdaya ku" mendapatkan bantuan pendanaan sebesar AUD \$10.000 yang dilaksanakan dalam bentuk penelitian, audit persampahan dan edukasi masyarakat dalam pemilahan sampah. Dalam kurun waktu satu tahun 2020-2021, program yang mengikutsertakan 125 rumah tangga di 5 desa Kabupaten Lombok Barat (Batu Kumbu, Telagawaru, Perempuan, Lembar Selatan dan Taman Baru) menghasilkan 7.355 kg sampah anorganik kategori layak dan bisa didaur ulang. Program ini juga memperoleh pengurangan emisi karbon setara dengan 2,907.57 kg dengan total nilai ekonomi yang telah dihasilkan sejak penimbangan bulan April hingga Desember 2021 sebesar Rp. 23.021.115.

Program ini tentu membantu masyarakat sekitar dalam mengurangi sampah sekaligus memberikan tambahan pemasukan dari penjualan sampah pada bank sampah (Syawaludin, komunikasi pribadi, 22 Maret 2022).

Hingga saat ini Bank Sampah Bintang Sejahtera telah berhasil memberdayakan 2.293 orang yang mayoritas diantaranya adalah mantan PMI dan keluarga PMI (Syawaludin, komunikasi pribadi, 22 Maret 2022). Aktivitas pada program ini tidak hanya mengedukasi warga namun diikuti serangkaian aktivitas lainnya untuk kemandirian ekonomi dan sarana dan prasarana bagi anak-anak PMI untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Program yang dilaksanakan Bank sampah Bintang Sejahtera juga memberikan dampak sosial ditengah kehidupan masyarakat. Bank sampah Bintang sejahtera berhasil mempererat hubungan antar masyarakat, interaksi masyarakat semakin dekat karena program yang dilakukan Bank sampah Bintang Sejahtera meminta masyarakat bisa memilah sampah dari hari senin hingga sabtu dan berkumpul bersama di titik yang telah ditentukan pada hari minggu untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilah. Selain itu, Bank sampah Bintang Sejahtera juga bisa mempererat hubungan keluarga karena para PMI tidak lagi keluar negeri untuk bekerja.

Implementasi *Transnational Public-Private Partnership* (TPP) antara Australia dan Bank Sampah Bintang Sejahtera

Transnational Public-Private Partnership (TPP) semakin marak dalam penelitian Hubungan Internasional, dimana pola kerjasama terbentuk antara negara dan aktor negara dengan mengadopsi fungsi pemerintahan yang sebelumnya menjadi satu-satunya otoritas negara berdaulat dan menciptakan model *hybrid governance*.

Selama satu dekade terakhir, jumlah TPP meningkat secara signifikan, dan saat ini dapat ditemukan di hampir semua bidang termasuk kerjasama pembangunan, politik lingkungan, sosial, dan keamanan (Broadwater & Kaul, 2005). Dengan menekankan pada kepentingan bersama antara negara dan aktor non-negara, TPP dinilai mampu menciptakan *win-win solution* melalui penyatuan sumber daya, keterampilan, dan keahlian.

Schaferhoff dkk (2019) mendefinisikan TPP sebagai bentuk tata kelola dengan memberikan otoritas politik yang lebih terhadap aktor non negara, dalam hal ini aktor non negara terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan pada negara tersebut. Hanya saja, menurut mereka ini bukan satu-satunya definisi dari TPP. Ada banyak bentuk dan pola implementasi TPP yang melibatkan aktor-aktor berupa negara, organisasi internasional, dan aktor swasta. Aktor swasta disini bisa berupa lembaga profit, non-profit, bahkan masyarakat sipil. Aktor-aktor ini akan bekerjasama dalam menerapkan "collective goods" di negara target. "Collective good" yang dimaksud dalam TPP adalah barang publik yang memiliki karakteristik sebagai barang yang konsumsinya nonrival dan/atau non-eksklusif, contohnya hak paten. Pemanfaatan "collective good" tidak berdasarkan hubungan sebab-akibat, namun lebih ke seberapa efektif pemanfaatannya. Selama ini TPP didominasi oleh organisasi internasional yang cukup *powerfull* dan menggandeng negara-negara yang tidak terlalu kuat untuk mengintervensi kebijakan dan implementasi kebijakan di negara tersebut (Schäferhoff dkk., 2009).

Namun, Storeng dan Puyvallee (2018) memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka aktor yang terlibat dalam TPP bisa berupa organisasi masyarakat sipil. Kehadiran masyarakat sipil dapat mengisi 'kesenjangan

akuntabilitas' dalam pemerintahan global yang dihasilkan dari kurangnya mekanisme kepemimpinan dan pengawasan parlemen. Sebagaimana contoh yang terjadi di dunia kesehatan yang mengandalkan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan suara penting dalam pembahasan kesehatan global yang sering didominasi oleh pemerintahan yang korup dan donor neo-kolonial. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran kunci dalam mengkatalisasi transformasi yang diperlukan untuk mencapai agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengusulkan alternatif kebijakan baru dan membangun aliansi lintas sektoral.

Hal ini dapat terjadi karena organisasi masyarakat sipil terhubung langsung dengan masyarakat yang ada di lapangan. Westerniter (2019) juga menyatakan TPP sebagai bentuk kemitraan di mana negara dan/atau organisasi antar pemerintah bekerja sama dengan pelaku bisnis dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan masalah transnasional. Model kemitraan telah mengatur berbagai domain kebijakan global di beberapa sektor termasuk perlindungan lingkungan.

Bank Sampah Bintang Sejahtera dalam hal ini berada di posisinya sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mitra dalam dan luar negeri dalam mewujudkan visi dan misi mereka untuk membantu masyarakat dunia meminimalisir sampah yang ada di bumi khususnya di area NTB, turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah lingkungan dunia, dan memberdayakan warga miskin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dimana warga miskin ini di dominasi oleh pekerja migran atau mantan pekerja migran dan keluarganya. Pemberdayaan PMI juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Hadirnya Bank Sampah Bintang Sejahtera dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk

membantu memberikan solusi terhadap permasalahan.

Di sisi lain, Australia ingin mengembangkan pengaruhnya ke berbagai negara di Kawasan Asia-Pasifik, terutama Indonesia. Karena secara geografis lokasi Indonesia dekat dengan Australia, dan hubungan diplomatik di antara kedua negara telah terjalin selama 71 tahun lamanya. Walau mengalami pasang-surut dalam membangun hubungan bilateral, namun perkembangan relasi Indonesia-Australia berjalan ke arah yang lebih baik terutama pembangunan kerjasama di bidang perdagangan, pariwisata, dan kerjasama Pendidikan dan kebudayaan. Apalagi semenjak diberlakukannya *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership (IACEPA)* pada 2018 yang lalu dan memburuknya hubungan Australia dan Cina, membuka peluang bagi kedua negara untuk semakin mengeratkan kerjasama (Roza, 2021).

Kekhawatiran Australia terhadap Cina didasarkan pada aktivitas politik Cina yang meluaskan pengaruhnya ke berbagai pelosok dunia termasuk ke Kawasan Pasifik Selatan. Upaya-upaya yang dilakukan Cina untuk memperkuat pengaruhnya dengan menawarkan bantuan keuangan ke negara-negara di Pasifik Selatan (Muhamad, 2022). Aktivitas politik yang dilakukan oleh Cina ini dinilai sebagai ancaman bagi Australia. Untuk mengimbangi Cina, Australia memperkuat kerjasama terutama ke Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Ada banyak upaya diplomasi yang dilakukan oleh Australia untuk mewujudkan kebijakan luar negerinya tersebut baik melalui hubungan langsung *government to government (G to G)*, *government to people (G to P)* ataupun *people to people (P to P)*, termasuk dengan menjalankan TPP dengan memanfaatkan organisasi

masyarakat sipil yang ada di Indonesia seperti Bank Sampah Bintang Sejahtera.

Menurut Storeng dan Puyvallee (2018) ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh organisasi masyarakat sipil untuk menjadi partner bagi negara ataupun organisasi internasional agar TPP dapat berjalan, yakni: 1) memiliki kapasitas untuk menyebarkan sumber daya; 2) memberikan umpan balik penting dari lapangan untuk memastikan implementasi yang efektif; 3) memastikan terciptanya solusi yang berkelanjutan serta dimiliki dan dikelola secara lokal; 4) berperan aktif dalam pengembangan kebijakan baik skala lokal, nasional, maupun global.

Empat kriteria organisasi masyarakat sipil untuk dapat berperan dalam TPP tersebut dimiliki oleh Bank Sampah Bintang Sejahtera. Bank Sampah Bintang Sejahtera memiliki kemampuan untuk menyebarkan sumberdaya, terbukti dari kemampuan mereka untuk mentraining 538 kelompok masyarakat di seluruh NTB berupa seminar, pelatihan, workshop dan pelatihan bisnis secara intens. Mereka juga memiliki 50 bank sampah binaan yang secara berkesinambungan melakukan pendampingan, melakukan penilaian dan peningkatan kapasitas, memberikan bantuan teknis dan keuangan seperti peralatan, alat manajemen, hibah benih hingga 100 juta rupiah per bank sampah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan operasi bank sampah (Rakhman, 2022). Setiap bulannya dari berbagai bank sampah yang mereka kelola mampu menghasilkan 50 ton sampah. Proses diseminasi yang mereka lakukan saat ini tidak hanya di NTB namun juga sudah meluas ke Sumbawa, Sumbawa Besar, Palu, Labuhan Bajo, Manggarai dan Denpasar. Bahkan pengaruhnya juga diperluas ke seluruh Indonesia dimana selama 5 tahun terakhir, berbagai komunitas, mahasiswa, dan institusi pendidikan dari

seluruh Indonesia datang ke kantor dan memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki untuk melakukan magang dan penelitian (Bintang Sejahtera, 2022).

Sasaran utama mereka adalah masyarakat lokal dengan memaksimalkan potensi sampah yang selama ini acapkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka juga berhasil menciptakan ribuan lapangan kerja baru yang mampu meredam tingginya angka keberangkatan warga menjadi pekerja migran ke luar negeri. Sehingga jumlah anak-anak yang kehilangan figur orang tua karena migrasi internasional tenaga kerja juga dapat ditekan. Aktivitas CSR yang mereka miliki juga menyasar anak-anak pekerja migran dengan menyediakan beberapa sanggar seni bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat seni yang mereka miliki dan mengarahkan mereka ke kegiatan yang lebih positif. Berjalannya program antara Bank Sampah Bintang Sejahtera dengan Pemerintah Australia dari 2017 hingga saat ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak.

Poin terakhir terkait peran aktif dalam pengembangan kebijakan baik skala lokal, nasional, maupun global tampak pada mitra kerjasama Bank Bintang Sejahtera baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri Bank Sampah Bintang Sejahtera bekerjasama langsung dengan Pemprov NTB dan Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI dalam program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pendampingan pada kelompok perempuan, keluarga pekerja migran, dan beberapa riset terkait serta upaya perwujudan Zero Waste Goal 2023 di NTB. Mitra dalam negeri Bank Sampah Bintang Sejahtera tidak hanya dari sektor pemerintah saja namun juga pihak swasta lainnya. Mitra luar negeri berasal dari berbagai negara, dari

kerjasama dengan berbagai negara ini, kerjasama yang cukup intens terjalin dengan Australia.

Australia, sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki ambisi untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik dengan menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara di Kawasan tersebut pun dengan menggunakan strategi diplomasi publik melalui pemberdayaan alumni yang pada akhirnya memberikan akses kepada Australia untuk juga menjalin kerjasama dengan masyarakat sipil termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Bank Sampah Bintang Sejahtera. Melalui kerjasama ini Australia mencoba menawarkan bantuan dalam penyelesaian permasalahan domestik yang memiliki implikasi global yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia yaitu masalah lingkungan, penanganan kemiskinan, dan penanggulangan masalah pekerja migran dan keluarganya. Dalam *Foreign Policy White Paper* Australia, sebagai negara yang makmur, Australia merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi penderitaan masyarakat dunia dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu Australia memberikan bantuan peluang ekonomi bagi warga negara lain yang membutuhkan agar semakin stabil mereka. Menurut Australia hal ini akan membantu mereka untuk rentan terhadap tantangan seperti migrasi tidak teratur dan ekstremisme. Selain itu, dari kacamata kebijakan luar negeri Australia, di dunia yang saling terhubung, berinvestasi dalam pembangunan negara lain membantu membatasi dampak negatif terhadap keamanan dalam negeri Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, 2017).

Sebagai upaya dalam menunjukkan pengaruhnya di Kawasan

Asia Pasifik, Australia berkomitmen untuk mencapai SDGs 2030 dengan melibat sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi internasional baik di dalam maupun di luar Australia. Untuk mencapai agenda 2030 tersebut, Australia memberikan bantuan pembangunan di luar negeri dan mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif agar dapat memerangi kemiskinan. Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun mitra untuk pencapaian SDGs, memperkuat sektor swasta dan sipil, serta mendukung pembangunan manusia guna kontribusi Australia terhadap kemakmuran dan stabilitas global.

Fokus utama kegiatan yang dilakukan oleh Australia bersama mitra swasta dan masyarakat sipil adalah mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan program yang berfokus pada inovasi dan mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang dipimpin oleh sektor swasta dan masyarakat sipil. Bantuan yang ada bertujuan membantu negara-negara mitra meningkatkan tata kelola, pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, perikanan, dan perairan. Juga berupa bantuan infrastruktur dan kapasitas yang dibutuhkan negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Masih dalam *foreign policy white paper* Australia, disampaikan bahwa program kemitraan juga diharapkan mampu mengatasi ketidaksetaraan dan perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam. Untuk hal ini, Australia menganggarkan hingga \$500 juta per tahun. Selama tahun 2017-2018 Asia Tenggara, terutama Indonesia, mendapatkan porsi bantuan terbesar mencapai \$883 juta (Department of Foreign Affairs and Trade, 2017).

SIMPULAN

Transnational public-private partnership (TPP) memberi ruang kerjasama yang luas dan holistik dalam menangani permasalahan negara ataupun dunia saat ini. Karena melalui TPP membuka peluang kerjasama yang tidak saja melibatkan aktor negara dan non-negara di tataran internasional, namun juga dapat memberi peluang keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil di ranah lokal. Kendala birokrasi yang sering kali membuat kerjasama bilateral antar negara tidak berjalan dengan baik atau faktor korupsi di negara sasaran yang mengakibatkan program yang disusun tidak menjadi alternatif solusi sebagaimana yang diharapkan, maka keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil yang lebih kredibel dengan beberapa kriteria menjadikan TPP sebagai langkah yang diambil negara lain ataupun organisasi internasional dalam menjalankan misinya.

Studi kasus kerjasama TPP antara pemerintah Australia dengan Bank Sampah Bintang Sejahtera dalam memberdayakan PMI beserta keluarga dan masyarakat miskin di NTB menjadi salah satu *best practice* bagaimana bentuk kerjasama ini dapat dilaksanakan. Tentu masih ada kekurangan dari kerjasama yang baru terjalin selama lebih kurang lima tahun kebelakang, namun hasil yang ditunjukkan dari TPP ini menunjukkan bahwa program yang dihasilkan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat NTB dan penanaman citra baik Australia di Kawasan Asia Pasifik. Secara teoritis perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi mengenai keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil dalam TPP, terutama mengenai keterkaitan mereka dalam *global governance* dan sebagai pemberi kebijakan dalam permasalahan global yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- AGS Indonesia. (2022). Alumni Grant Scheme (AGS). *Australia Awards in Indonesia*. <https://australiaawardsindonesia.org/content/361/15/alumni-grant-scheme-ags>
- Andonova, L. B. (2017). Governance entrepreneurs: International organizations and the rise of global public-private partnerships. Dalam *Governance Entrepreneurs: International Organizations and the Rise of Global Public-Private Partnerships* (hlm. 275). <https://doi.org/10.1017/9781316694015>
- Aswindo, M., Hanita, M., & Simon, A. J. (2021). KERENTANAN DAN KETAHANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA MASA PANDEMIC COVID-19. 9(1), 442–452.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2022). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode 2021*. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). https://drive.google.com/file/d/1i5RsKQlaQnL5fsnUd5UHNyJ_tlcdbly_/view?usp=sharing
- Bintang Sejahtera. (2022). *Bintang Sejahtera*. <https://www.bintangsejahtera.co.id/index.php>
- Broadwater, I., & Kaul, I. (2005). Global Public-Private Partnerships. The Current Landscape. *UNDP/ODS Background Paper*.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2017). *2017 Foreign Policy White Paper*. Australian Government. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/misite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/pdf/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>
- Edwards, D., & Radloff, A. (2021). *Australia Awards Alumni Global Tracer Survey 2020*.
- Erizal, A., Agusmidah, A., & Ningsih, S. (2020). PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Law Jurnal*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.784>

Halid, A., Yulianto, K., & Saleh, M. (2022). STRATEGI PENGELOLAAN BANK SAMPAH di NTB (Studi Kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 763–770.

International Organization for Migration. (2022). *Migration and the SDGs: Measuring Progress*. International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/SDG-an-edited-volume.pdf>

Iqbal, M., & Gusman, Y. (2015). Pull and Push Factors of Indonesian Women Migrant Workers from Indramayu (West Java) to Work Abroad. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p167>

Liu, J., Love, P. E. D., Davis, P. R., Smith, J., & Regan, M. (2015). Conceptual Framework for the Performance Measurement of Public-Private Partnerships. *Journal of Infrastructure Systems*, 21(1), 1–15. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)IS.1943-555X.0000210](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000210)

McConachie, B. (2019, Mei 19). Australia's Use of International Education as Public Diplomacy in China. *Australian Institute of International Affairs*. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australias-use-of-international-education-as-public-diplomacy-in-china/>

Migrant Care. (2020). *Migrant Care Outlook 2020: Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Berbasis Data*. Migrant Care. <https://migrantcare.net/2020/01/migrant-care-outlook-2020/>

Muhamad, S. V. (2022). KEMENANGAN PARTAI BURUH DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA. *Research Center Expertise Agency of DPR RI*, XIV(11), 7–12.

Nurhayati, E., Wahyuni, E. T., & Puspitasari, E. (2021). Risiko Infrastruktur Jalan Tol dengan Skema Public-Private-Partnership (PPP) di ASEAN: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(1), 43–60. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i1.8743>

Nurhidayati, T. (2014). *PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK PADA*

KELUARGA BURUH MIGRAN INTERNASIONAL DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL. 2(2), 88–92.

Rakhman, F. (2022, April 4). Cerita Syawaludin Bangun Bintang Sejahtera, Berawal dari Mulung Saat Kuliah. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2022/04/04/cerita-syawaludin-bangun-bintang-sejahtera-berawal-dari-mulung-saat-kuliah/>

RisseKappen, T. (1995). *Bringing Transnational Relations Back in: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions*. Cambridge University Press. https://beckassets.blob.core.windows.net/product/readingsample/466537/9780521484411_e_xcerpt_001.pdf

Roza, R. (2021). *STRENGTHENING INDONESIA-AUSTRALIA RELATIONS FOR STRATEGIC INTEREST IN THE INDO-PACIFIC*. XIII(18), 7–12.

Schäferhoff, M., Campe, S., & Kaan, C. (2009). Transnational Public-Private Partnerships in International Relations: Making Sense of Concepts, Research Frameworks, and Results. *International Studies Review*, 11(3), 451–474. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2009.00869.x>

Soemitro, R. A. A., & Suprayitno, H. (2020). Preliminary Reflection on Basic Problematics of National Public Infrastructure Financing in Indonesia. *Journal of Infrastructure & Facility Asset Management*, 2(1), 51–62. <https://doi.org/10.12962/jifam.v2i1.6908>

Syawaludin. (2022, Maret 22). *Wawancara Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB [Zoom]*.

The Global Alumni Team. (2022). Australia Global Alumni. *Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government*. <https://www.dfat.gov.au/people-to-people/global-alumni/Pages/global-alumni>

Wong, D. F. K., Li, C. Y., & Song, H. X. (2007). Rural migrant workers in urban China: Living a marginalised life. *International Journal of Social Welfare*, 16(1), 32–40. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2007.00475.x>